

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya, yaitu hak merasakan kenyamanan dan keamanan dalam hidupnya. Hak ini merupakan fondasi penting bagi kualitas dan keberlangsungan hidup manusia sekaligus menjadi kebutuhan dasar manusia yang tertuang dalam teori hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Ketika hidup seorang manusia merasa nyaman dan aman, atau bebas dari rasa takut, maka mereka akan menjalani hidup dengan tenang, damai, dan produktif. Dalam mewujudkan hal tersebut, peran masyarakat di lingkungan sekitar sangatlah penting. Masyarakat yang menjaga pola lingkungan inklusif, toleran, dan adil bagi semua manusia baik laki-laki maupun Perempuan. Untuk meraih kenyamanan dan keamanan hidup terutama bagi perempuan yang notabene-nya sering mendapatkan diskriminasi, perlu ada gerakan yang dilakukan, yaitu gerakan feminisme (Nathania Octaviani *et al.*, 2022).

Pada awal kemunculan istilah feminisme ini dari sebuah gerakan sosial demi mengangkat dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Gerakan sosial ini muncul pada tahun 1848 oleh Elizabeth C. Stanton bersama Susan B. Anthony di New York. Gerakan sosial ini merupakan konferensi perempuan pertama yang menggunakan istilah feminisme dan membahas mengenai pentingnya perempuan mendapatkan

hak pendidikan serupa dan setara dengan laki-laki (Melati, 2019). Feminisme di Indonesia masih kerap disalahpahami sebagai paham atau ideologi yang bertentangan dengan nilai agama dan nilai lokal. Padahal, feminisme sebagai gerakan sosial dan intelektual telah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan khususnya bagi perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender (Lusianawati *et al.*, 2025).

Feminisme tidak hanya melulu untuk memperjuangkan hak perempuan. Meski feminisme ini dikenal dengan gerakan yang identik dengan perempuan, namun tidak sedikit laki-laki yang mendukung gerakan ini. Feminisme bukan sebagai ideologi yang membenci kehadiran dan hak laki-laki, tapi feminisme muncul untuk memperjuangkan para laki-laki guna melawan paradigma maskulinitas tradisional, hingga sering muncul istilah “pro perempuan, namun tidak anti laki-laki” (Citraningtyas *et al.*, 2022).

Gerakan feminisme telah menjadi salah satu gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sejak zaman dahulu yang merujuk pada konteks sosial dan budaya. Gerakan feminisme di Indonesia yang berfokus pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sudah ada sejak tahun 1900-an oleh Raden Ajeng Kartini (Isnawati & Isnaini, 2022). Perempuan dengan ketidakadilan sosial dan budaya yang menimpanya telah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Stigma yang dianut oleh masyarakat bahwa perempuan sebagai makhluk inferior akan terus menjadi landasan diskriminasi yang menimpanya dan menjadi alasan mengapa ketidakadilan terus terjadi kepada perempuan (Widayanti *et al.*, 2024).

Pada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yaitu pada jurnal “Praktik Feminisme dalam Kehidupan Anggota Komunitas *Feminis Space* di Bali” (Anastacia *et al.*, 2024), perempuan di Bali banyak mendapati berbagai stereotipe yang merugikan kehidupan perempuan. Misalnya, jika ada seorang perempuan menikah, maka ia harus ikut dengan keluarga laki-laki. Atau misalnya, jika tidak ada seorang laki-laki di sebuah keluarga, maka beban sepenuhnya akan ditanggung oleh perempuan. Seiring berkembangnya zaman dan terbukanya pula pikiran para perempuan di Bali, munculah keinginan untuk menuntut emansipasi. Salah satunya diejawantahkan dengan dibentuknya suatu organisasi yang berfokus pada perjuangan gerakan feminisme.

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mencari tahu dengan cara menganalisis apa yang menjadi prinsip dan strategi Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya dalam memperjuangkan gerakan feminisme ditinjau dalam teori gerakan sosial repertoar aksi dari Charles Tilly, ini juga menjadi keterbaharuan penelitian karena membahas gerakan feminisme dari sudut pandang gerakan sosial untuk mewujudkan tujuan kolektif.

Gerakan feminisme bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender terhadap kaum perempuan dalam memperjuangkan hak yang sama sebagai manusia. Gerakan feminisme ini menghadirkan gebrakan bagi kepedulian terhadap kesetaraan gender, ketimpangan sosial, maupun kekerasan terhadap perempuan (Januastasya Audina, 2022). Gerakan feminisme muncul sebagai respon terhadap sistem patriarki yang mendominasi perilaku masyarakat dan menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Dari patriarki ini, telah menciptakan struktur

sosial yang tidak setara dan membatasi akses perempuan ke pendidikan, peluang kerja, pemanfaatan sumber daya manusia, bahkan kekerasan terhadap perempuan (Wibowo *et al.*, 2022).

Di Indonesia, gerakan feminisme telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan berbagai organisasi atau komunitas yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengkritik sistem patriarki (Nurhadi *et al.*, 2024). Yang menjadi tantangan adalah sikap konsistensi yang dijaga untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan resistensi dari paradigma masyarakat yang patriarkis. Namun juga, ini membuktikan bahwa ada semacam kegagalan yang terjadi pada berjalannya sebuah sistem dari negara, instansi, dan kebijakan di Indonesia khususnya di Kota Tasikmalaya.

Hadirnya sebuah organisasi secara tidak langsung menjadi kritik dari masyarakat atas tidak optimal dan gagalnya negara dalam menangani suatu persoalan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga pada akhirnya, rakyat dengan kebebasan yang dimilikinya membentuk sebuah gerakan atau kelompok untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuan kolektif mereka. Organisasi ini seolah hadir sebagai wahana inklusif yang lebih dekat dengan masyarakat untuk mengkritik apa yang menjadi keresahan bersama, peran ini seharusnya dapat diisi oleh perangkat formal pemerintahan yang memiliki kewenangan secara resmi dan berkedudukan untuk membantu rakyatnya.

Negara melalui perangkat-perangkat formalnya tidak dapat berperan sebagai wahana edukatif dan melaksanakan pemantauan sehingga banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Hadirnya KOMNAS Perlindungan Perempuan

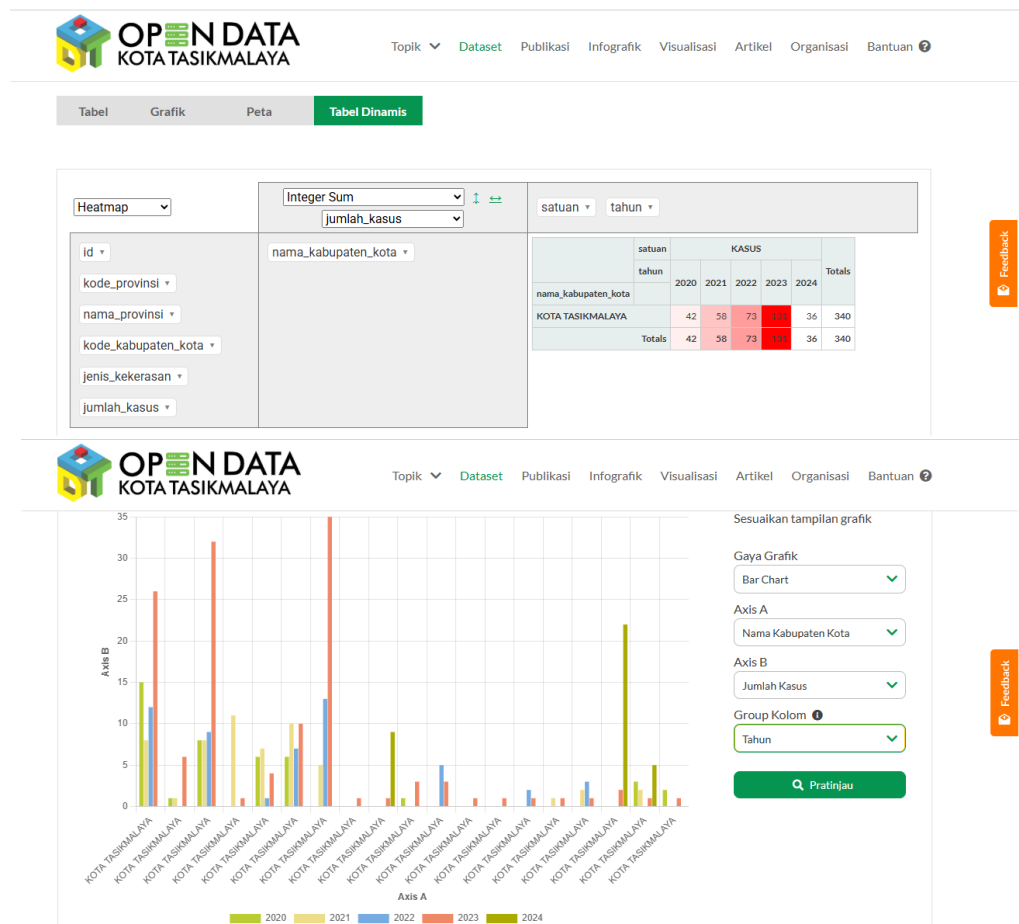
pada tingkat nasional dan DPPKBP3A pada tingkat daerah merupakan respon pemerintah dari adanya kasus yang menimpa perempuan, namun masyarakat menganggap bahwa fungsinya tidak berperan secara optimal. Dalam penegakkan hukum misalnya, seringkali penanganan kasus berjalan lamban dan putusan tidak berpihak pada korban, seolah menyepelekan apa yang dialami oleh perempuan.

Seyogianya sebuah negara dan perangkat-perangkatnya dapat berperan sebagai fasilitator yang memiliki kewenangan secara formal. Menjadi suatu sistem pemerintahan yang edukatif dan dekat dengan rakyatnya, menjadikan setiap unsur dari ipoleksosbudhankam sebagai pisau analisis untuk menghadapi suatu persoalan. Ideologi, bagaimana patriarki dan stereotip dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan. Politik, bagaimana kebijakan politik dapat memengaruhi dan berpihak pada hak-hak perempuan serta kesetaraan gender. Ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi dapat memengaruhi akses perempuan ke sumber daya dan kesempatan. Sosial, bagaimana stuktur sosial dan norma di masyarakat dapat memengaruhi peran dan status perempuan. Budaya, bagaimana budaya dan tradisi yang menjadi konstruksi sosial dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan. Pertahanan dan Keamanan, bagaimana ini dapat memegaruhi situasi dan kondisi hidup perempuan. Dan inilah yang seharusnya dipenuhi oleh negara untuk menjamin hidup setiap warga negaranya.

Saat ini, kekerasan terhadap perempuan seolah menjadi tindakan repetitif yang tak ada obat penawarnya. Dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi lebih bagi para pelaku untuk dibuat jera. Lantas, kasus kekerasan perempuan terus bertambah. Bahkan saat ini, para korban lebih banyak yang mengadukan kasus-kasus

perempuan bukan kepada perangkat formal pemerintahan, melainkan pada lembaga masyarakat dalam bidang anti kekerasan terhadap perempuan. Ini justru menjadi kritik besar bagi negara atas peran dan kinerja para pemangku kebijakan.

Ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan membuat hak dan rasa aman yang menjadi kebutuhan manusia direnggut oleh perilaku patriarkal yang merusak masa depan setiap perempuan. Di Kota Tasikmalaya, kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sampai merenggut hak hidup dan masa depannya masih banyak terjadi, dan tentu perempuanlah yang menjadi korbannya.



Gambar 1.1 Data Kekerasan Seksual Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, menunjukkan kenaikan jumlah korban kekerasan seksual dari tahun ke tahun.



Gambar 1.2 Data Kekerasan Seksual Kota Tasikmalaya Tahun 2025

Pada media News Tasikmalaya.com, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya mencatat sebanyak 202 kasus kekerasan sepanjang tahun 2025 di antaranya 82 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 74 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki, 40 kasus menimpa perempuan, dan 7 kasus menimpa laki-laki. Dari total 55 laporan yang masuk, kekerasan fisik sebanyak 29 kasus, kekerasan psikis sebanyak 13 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 12 kasus, serta tindak pidana perdagangan orang sebanyak 1 kasus (Tian, 2025). Meski

data tersebut belum secara resmi di unggah dalam laman DPPKBP3A, namun data tersebut membuktikan bahwa perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya masih sering mengalami kekerasan seksual dan diskriminasi.

Kekerasan merupakan segala sesuatu tindakan atau perbuatan baik fisik atau non-fisik yang menimbulkan bahaya hingga taruhan nyawa. Menurut Peraturan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 ada beberapa kategorisasi atau bentuk-bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik (perkelahian, penganiayaan, dll), kekerasan psikis (intimidasi, penghinaan, dll), perundungan (*bully*, memperlakukan, dll), kekerasan seksual (pelecehan, pemerkosaan, dll), diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Dalam konteks ini, kekerasan berbasis gender terjadi karena sistem patriarki yang dibenarkan oleh masyarakat, menganggap bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan dapat mendominasi perempuan yang dianggap berada pada strata di bawahnya.

Salah satu lembaga atau organisasi penggerak dalam bidang ini di Kota Tasikmalaya adalah Lembaga Taman Jingga, suatu organisasi atau lembaga non-profit yang berfokus pada edukasi dan advokasi mengenai isu anak dan perempuan. Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya hadir di Kota Tasikmalaya untuk menjadi wadah edukasi dan advokasi dalam upaya membela hak anak dan perempuan. Dari awal berdiri pada 15 Februari 2021 dan konsisten memperjuangkan hak perempuan hingga saat ini, menjadi hal yang menarik untuk dianalisis perihal apa yang menjadi prinsip, strategi, dan pandangan dari Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya terkait gerakan feminisme dalam hal kekerasan

berbasis gender. Gerakan ini menjadi penting untuk terus tumbuh memperjuangkan keadilan bagi kehidupan seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Hadirnya Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya berupaya untuk mengisi kekosongan dari peran perangkat pemerintah untuk mendampingi dan mengawal setiap aduan dari pada korban yang melapor kepada lembaga ini. Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya menjadi wahana pembentukan kesadaran dan secara tidak langsung menjadi kritik besar-besaran terhadap dinas atau instansi pemerintah yang seharusnya dapat menjadi ruang aman dan nyaman bagi para korban untuk mengadakan suatu kasus yang menyimpannya.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya dalam menyikapi kasus kekerasan seksual dan ketidakadilan terhadap perempuan adalah dengan upaya membuka ruang aspirasi dan advokasi untuk memengaruhi dan mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi perempuan. Upaya edukasi tentang hak perempuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan berbagai permasalahan sosial dan memengaruhi para pelaku kepentingan sehingga berpihak pada kepentingan terbaik bagi perempuan. Upaya Pemberdayaan dan pendampingan untuk memfasilitasi dan mendorong kelompok perempuan yang mengalami permasalahan sehingga dapat mengambil tindakan dan solusi demi terpenuhinya perlindungan serta hak-hak perempuan, pendampingan hukum, dan pendampingan psikologis untuk menciptakan perubahan yang lebih aman dan adil bagi seluruh manusia.

Pada penelitian ini, permasalahan muncul karena terdapat ketidaksesuaian antara tingginya kebutuhan perlindungan perempuan atas berbagai kasus yang

terjadi dengan keterbatasan peran negara yang pasif, juga terdapat fenomena sosial yang melatarbelakangi munculnya kebutuhan akan prinsip dan strategi gerakan yang efektif. Dan di tengah kondisi ini, Lembaga Taman Jingga justru tetap mampu bertahan dan aktif melakukan gerakan. Ini menjadi alasan penting untuk menganalisis bagaimana prinsip dan strategi Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya dibentuk dan dijalankan.

Maka dari itu, penelitian ini akan bermanfaat sebagai kompas perjuangan dan untuk melanggengkan perjuangan gerakan feminisme dalam membela hak perempuan demi tercapainya keamanan dan keadilan hidup, serta bermanfaat bagi bidang pendidikan di masa depan untuk menambah literatur akademik pada bidang gerakan feminisme yang secara nyata diwujudkan pada suatu organisasi yaitu Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi. Penelitian membutuhkan alasan atau landasan yang kuat dengan dimuat dalam rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan komponen utama untuk menentukan fokus penelitian karena berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tahapan pada penelitian (Oemanu & Rindrayani, 2025). Maka, berdasarkan masalah pada latar belakang di atas, penulis merumuskan dan menentukan fokus tujuan penelitian ini menjadi beberapa pertanyaan yaitu:

1. Apa prinsip dan strategi yang dilakukan oleh Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya dalam memperjuangkan gerakan feminisme berdasarkan teori gerakan sosial repertoar aksi dari Charles Tilly?
2. Apa tantangan dalam mengimplementasikan prinsip dan strategi gerakan feminisme pada Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya?
3. Apa dampak gerakan feminisme yang dilakukan oleh Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan peranan penting dalam pendidikan karena bertujuan untuk menjadi wahana intelektual, akademik, pengetahuan, edukasi, inovasi, hingga menghadirkan solusi dari suatu permasalahan. Penelitian pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah yang berbasis data dan sistematis (Nur *et al.*, 2024). Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana gerakan feminisme yang dilakukan oleh Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya dari didirikannya hingga saat ini terhadap perjuangan feminisme, prinsip dan strategi gerakan di Kota Tasikmalaya.

1.4 Batasan Penelitian

Suatu penelitian memiliki permasalahan yang luas, sebab itu, perlu ditetapkan terlebih dahulu batas-batas penelitian agar tujuan penelitian yang sebenarnya tidak

kabur. Batasan penelitian digunakan untuk menjelaskan fokus penelitian, sehingga tidak terjadi penyimpangan serta penyebarluasan pokok permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mencari tahu apa yang menjadi prinsip, strategi, dan nilai-nilai dari Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya. Menggunakan teori Repertoar dari Charles Tilly dan dengan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan dari stigma masyarakat dan ketimpangan yang menimpa perempuan berbuah dari konstruksi sosial dan sistem patriarki. Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya menjadi sasaran utama untuk peneliti analisis terhitung sejak tanggal didirikannya yaitu 15 Februari 2021 hingga Juni 2026.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan juga memperkaya literatur akademik mengenai gerakan feminisme yang dilakukan oleh Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya untuk memperjuangkan keadilan terhadap perempuan, juga sebagai organisasi yang mampu menampung aspirasi dan advokasi, mendampingi, hingga mengawal mengenai isu perempuan.

- b. Penelitian ini sebagai pengetahuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik mengenai gender dan politik, khususnya mengenai gerakan feminisme.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu penelitian pembandingan yang ingin meneliti mengenai gerakan feminisme pada prinsip dan strategi suatu organisasi.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai bahan prasyarat dalam melakukan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

